

## ABSTRAK

### Peranan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Penertiban Tambang Emas

Oleh : Antonius.

Penambangan emas berisiko, dan memakan korban jiwa yang disebabkan oleh kecelakaan tambang. Seperti yang pernah terjadi, penambangan emas telah menelan 11 orang penambang yang meninggal karena tertimbun longsoran lubang tambang di Kecamatan Sangir. Secara umum, para penambang emas mengatakan bahwa gejala-gejala kesehatan yang sering timbul antara lain penyakit gatal-gatal, sakit perut, mual, muntah-muntah, demam, pilek, sesak napas pusing-pusing, sakit kepala, maag, tangan sering kesemutan dan mudah lupa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran serta upaya pemerintah dalam menertibkan penambangan emas di Kanagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sengaja). Uji keabsahan data dengan teknik ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan dan teknik triangulasi data dianalisis melakukan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan fisik seperti kerusakan alam, pencemaran air dan tanah serta lingkungan sosial yang menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Peranan pemerintah kabupaten dalam penertiban penambangan emas telah membuat kebijakan dengan membentuk Tim Penertiban Penambangan Emas dan menjalin koordinasi dengan instansi pemerintahan yang terkait serta unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, mereka telah dilibatkan dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berbagai peraturan kepada penambang untuk memiliki izin penambangan. Selain itu penertiban penambangan emas juga dilakukan secara represif oleh pihak penegak hukum (*law enforcement*). Solusi untuk memecahkan masalah penambangan tanpa izin dengan melakukan komunikasi yang baik dan lancar antar instansi pemerintah dan bekerja sama dalam mencari solusi alternatif serta mempertimbangkan aspek dan fenomena sosiologis yang ada dalam masyarakat.